



Risalah Kebijakan

Nomor 4, Agustus 2022



Bagaimana Media Merespons Kebijakan Kurikulum Merdeka?



Ringkasan

Strategi komunikasi kebijakan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut ditandai dengan pemberitaan Kurikulum Merdeka sepanjang 11 Februari hingga 4 Maret 2022 yang sebagian besar bernada positif, namun jumlahnya relatif minim jika dibandingkan dengan pemberitaan topik pendidikan lain, yaitu hanya 66 artikel berita. Sebagian besar artikel mengulas tentang keunggulan Kurikulum Merdeka, meskipun masih ada ulasan bernada kritik dan saran terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Bahasan mengenai kebingungan guru dan siswa, tantangan kolaborasi antar pihak, rendahnya kompetensi guru, dan sinkronisasi dengan perguruan tinggi, merupakan beberapa ulasan bernada kritik yang perlu mendapat perhatian. Hal lain yang menjadi catatan adalah terdapat sekitar 1.502 unggahan mengenai Kurikulum Merdeka di Twitter pada periode 11 Februari - 4 Maret 2022. Jumlah ini relatif lebih sedikit jika dibandingkan topik pendidikan lainnya. Dari sejumlah unggahan tersebut, sekitar 44% bernada positif, 41% netral, dan 14,6% lainnya bernada negatif.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan sejumlah akar permasalahan, yaitu belum maksimalnya penggunaan platform media sosial, kurangnya *influencer* yang terlibat, dan belum maksimalnya peran kehumasan. Untuk mengatasi hal tersebut, direkomendasikan 4 alternatif kebijakan, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan strategi kehumasan, mengupayakan peningkatan SDM bidang kehumasan, memaksimalkan penggunaan platform media sosial, dan menggunakan *influencer* dalam komunikasi kebijakan Kurikulum Merdeka.

Konteks

Pandemi COVID-19 memunculkan dampak *learning loss* yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di hampir seluruh negara di dunia (INOVASI & Puslitjak, 2021; Engzell et al., 2021). Sebagian besar negara melakukan berbagai strategi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pemulihan pembelajaran di wilayahnya.

Di Indonesia, perbaikan kurikulum telah menjadi fokus perbaikan mutu pendidikan, bahkan sebelum pandemi terjadi. Oleh karena itu, ketika ancaman *learning loss* semakin nyata karena penutupan sekolah dan belum kunjung optimalnya proses belajar jarak jauh, kebijakan seperti penyederhanaan kurikulum dan pemberian fleksibilitas pada satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing tingkat satuan pendidikan menjadi upaya menjanjikan terhadap perbaikan kualitas pembelajaran, baik selama pandemi maupun di masa depan.

Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus yang terbukti mampu mengurangi kehilangan capaian pembelajaran siswa dalam kemampuan literasi dan numerasi (INOVASI dan Puslitjak, 2021) semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif (Paparasi Mendikbudristek, 11 Februari 2022). Atas dasar hal tersebut, Kurikulum Merdeka diluncurkan Mendikbudristek pada 11 Februari 2022 sebagai rangkaian dari seri kebijakan Merdeka Belajar episode ke-15. Dalam peluncuran itu disebutkan bahwa sebagai upaya pemulihan pembelajaran, sekolah diberikan kebebasan dalam menentukan kurikulum yang akan diterapkan, yaitu tetap menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), atau Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum Prototipe telah diterapkan secara terbatas pada 2.500 satuan pendidikan Pelaksana Sekolah Penggerak (PSP) dan SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK). Kurikulum ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain dari struktur kurikulum yang lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial, memberikan keleluasaan bagi guru dalam menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta mendorong capaian pembelajaran siswa secara holistik (kompetensi dan karakter).

Melalui peluncuran tersebut, Mendikbudristek berharap terdapat lebih banyak satuan pendidikan yang menerapkan dan mengambil manfaat dari kurikulum baru ini dengan cara menerapkannya secara mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023. Terdapat tiga opsi dalam penerapan Kurikulum Merdeka yang dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sekolah, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang diterapkan, menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan Kemendikbudristek, dan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar yang diperlukan.

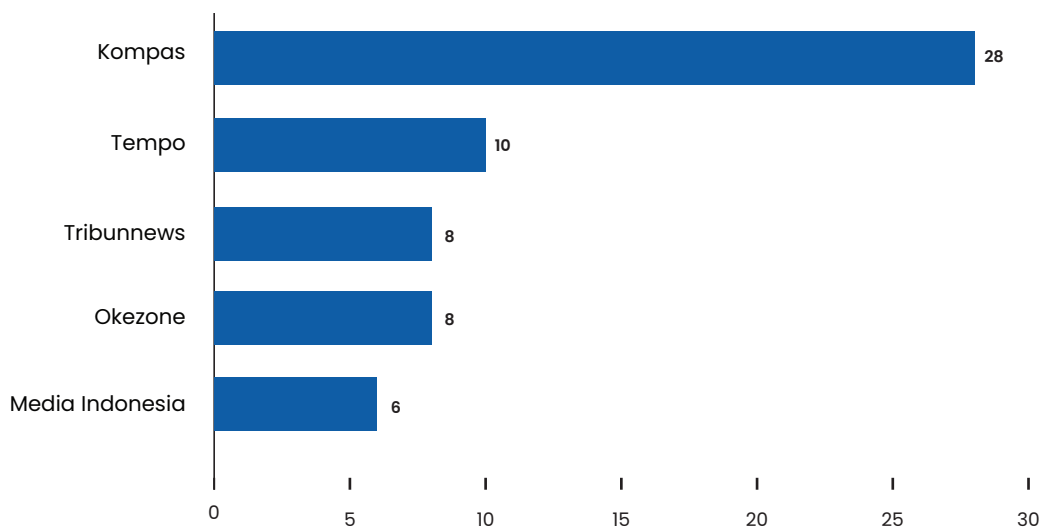
Sebagai kebijakan baru di bidang pendidikan, peluncuran kurikulum ini menuai beragam respons dari publik, mulai dari yang menyambut baik hingga mempersoalkannya. Respons ini salah satunya tergambar melalui berbagai media pemberitaan dan perbincangan di media sosial. Upaya memahami respons publik ini menjadi penting guna memperbaiki strategi komunikasi kebijakan ke depan. Selain menggambarkan respons publik, peran media sebagai sumber informasi juga menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dijalankan (Daddow, 2019). Dalam hal ini, media berperan penting dalam memobilisasi perhatian publik sekaligus menjadi sumber informasi adanya sebuah kebijakan (Baumgartner & Jones, 1993; Jones & Wolfe, 2010). Pemberitaan melalui media memberikan “sinyal” tentang lingkungan kebijakan, dan isu apa yang perlu diprioritaskan atau tidak. Oleh karena itu, dalam beberapa kondisi, media berperan memberikan pertimbangan tentang arah kebijakan yang akan dirumuskan selanjutnya (Jones et al., 2013). Dalam konteks peluncuran Kurikulum Merdeka, survei yang dilakukan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP)

pada akhir Februari 2022 menunjukkan sebagian besar kepala sekolah (80,8%) telah mengetahui informasi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan sebagian lainnya (68,26%) telah memahami konsep, utamanya dari media *online* maupun media sosial (PSKP, 2022). Artinya, keberadaan media *online* dan media sosial cukup berpengaruh terhadap diseminasi kebijakan. Pengetahuan awal mengenai kebijakan yang tersebar luas ini dapat menjadi modal awal agar publik yang menjadi sasaran kebijakan dapat memahami sehingga diharapkan turut serta menerapkan kebijakan tersebut. Keputusan untuk menerapkan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun hal pertama yang perlu dicapai ialah diseminasi kebijakan yang dipahami dengan baik dan direspons secara positif.

Oleh sebab itu, untuk memahami respons maupun sentimen media *online* dan media sosial mengenai peluncuran Kurikulum Merdeka, PSKP melakukan studi terhadap artikel di media *online* dan unggahan di media sosial. Analisis pada media *online* dilakukan pada enam media, yaitu Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, Okezone.com, Tribunnews.com, dan MediaIndonesia.com, dengan kata kunci “Kurikulum Merdeka”. Sedangkan analisis terhadap media sosial dilakukan pada Twitter dengan kata kunci “Kurikulum Merdeka”, “Kurikulum Prototipe”, “Kurikulum Baru”, “Merdeka Mengajar”, dan “Perubahan Kurikulum”. Artikel berita dan unggahan media sosial tersebut diambil dalam rentang 11 Februari hingga 4 Maret 2022. Artikel berita diunduh dari setiap laman berita, sedangkan unggahan media sosial dikumpulkan melalui Library Snsrape di aplikasi Python. Studi ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi tentang strategi komunikasi informasi mengenai Kurikulum Merdeka.

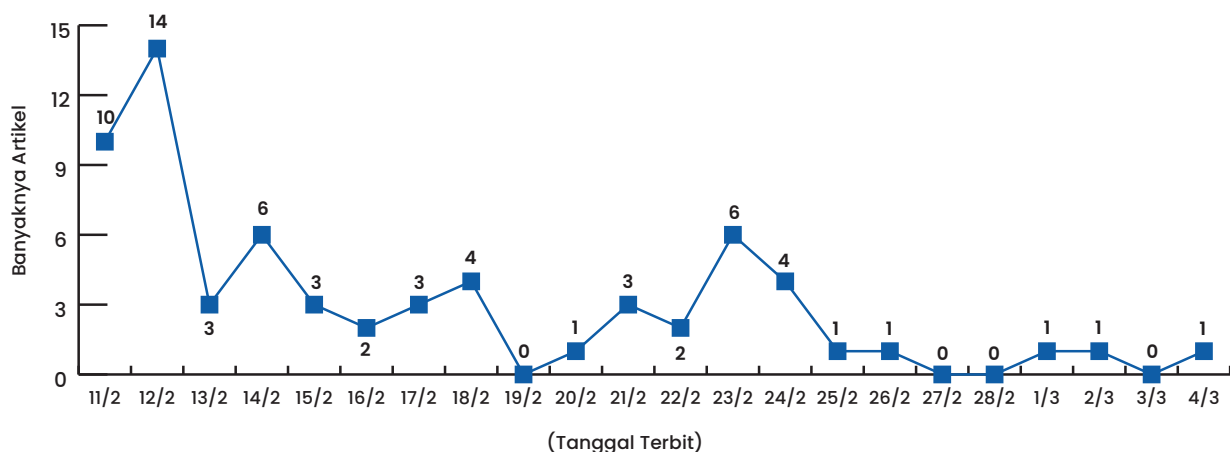
Pada periode 11 Februari - 4 Maret 2022, sebagian besar pemberitaan mengenai Kurikulum Merdeka bernada positif. Namun, dari enam media yang dianalisis, jumlahnya relatif minim, yaitu hanya 66 artikel.

Dari sejumlah 66 artikel tersebut, Kompas.com merupakan media dengan jumlah pemberitaan mengenai Kurikulum Merdeka yang paling banyak dibandingkan lima media lainnya (Grafik 1). Jika dibandingkan dengan topik pemberitaan lain dalam periode yang sama, jumlah artikel terkait Kurikulum Merdeka masih sangat sedikit dibandingkan isu lain, misalnya terkait topik “pembelajaran tatap muka”. Melalui *filter* pencarian di laman Detik.com saja, misalnya, ditemukan sekitar 155 topik mengenai “pembelajaran tatap muka” sepanjang 11 Februari hingga 4 Maret 2022 (Detik.com, 11 Februari - 4 Maret 2022).



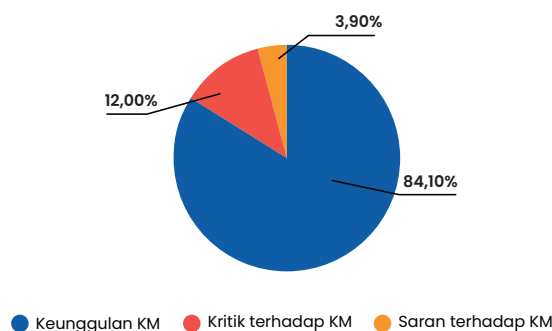
Grafik 1 Jumlah Artikel yang membahas “Kurikulum Merdeka” (Periode 11 Februari – 4 Maret 2022) (n=66 Artikel)

Dilihat dari trennya, unggahan artikel di media *online* mencapai puncaknya sehari setelah Kurikulum Merdeka diluncurkan oleh Mendikbud melalui laman Youtube Kemdikbud RI, yaitu pada 12 Februari 2022 (Grafik 2). Selepas itu, tren unggahan artikel mengenai Kurikulum Merdeka kemudian menurun, dan bahkan pada tanggal tertentu, enam media *online* yang dianalisis sama sekali tidak melakukan memberitakan topik Kurikulum Merdeka, yaitu pada 19, 27, dan 28 Februari, serta pada 3 Maret 2022. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai Kurikulum Merdeka belum menjadi fokus bahasan di sebagian besar media, khususnya media di luar laman resmi kementerian. Kondisi serupa juga pernah digambarkan dalam temuan studi terkait kebijakan pendidikan di masa pandemi, yang dianalisis dari Instagram dan Facebook resmi Kemendikbud dan 16 portal media *online*, yang menunjukkan bahwa unggahan serta interaksi yang terjadi pada akun resmi Kemendikbud, lebih banyak dibandingkan pada portal berita sepanjang Maret - Februari 2020 (Afif dan Pratama, 2021).



Grafik 2 Tren Penerbitan Artikel mengenai “Kurikulum Merdeka” (Periode 11 Februari – 4 Maret 2022) (n=66 Artikel)

Jumlah dan topik pemberitaan di setiap media juga beragam. Sebagian besar artikel (84,1%) mengulas tentang “keunggulan Kurikulum Merdeka”, meskipun ada pula sebanyak 12,00% artikel yang menampilkan “kritik terhadap Kurikulum Merdeka”, dan 3,90% lainnya membahas mengenai “saran terhadap implementasi Kurikulum Merdeka” (Grafik 3). Sebagian besar artikel yang memuat topik keunggulan Kurikulum Merdeka umumnya mengutip penjelasan Mendikbud yang disampaikan ketika peluncuran Kurikulum Merdeka pada 11 Februari 2022 lalu. Derivasi topik keunggulan ini umumnya membahas mengenai fleksibilitas penerapan Kurikulum Merdeka, pembelajaran yang terdiferensiasi dan sesuai bagi siswa, penyediaan perangkat dan dukungan pembelajaran, Kurikulum Merdeka akan lebih berfokus pada materi pembelajaran yang esensial, dan berbagai keunggulan lainnya.



Grafik 3 Topik Bahasan dalam Artikel (n=267 topik dari 66 artikel)

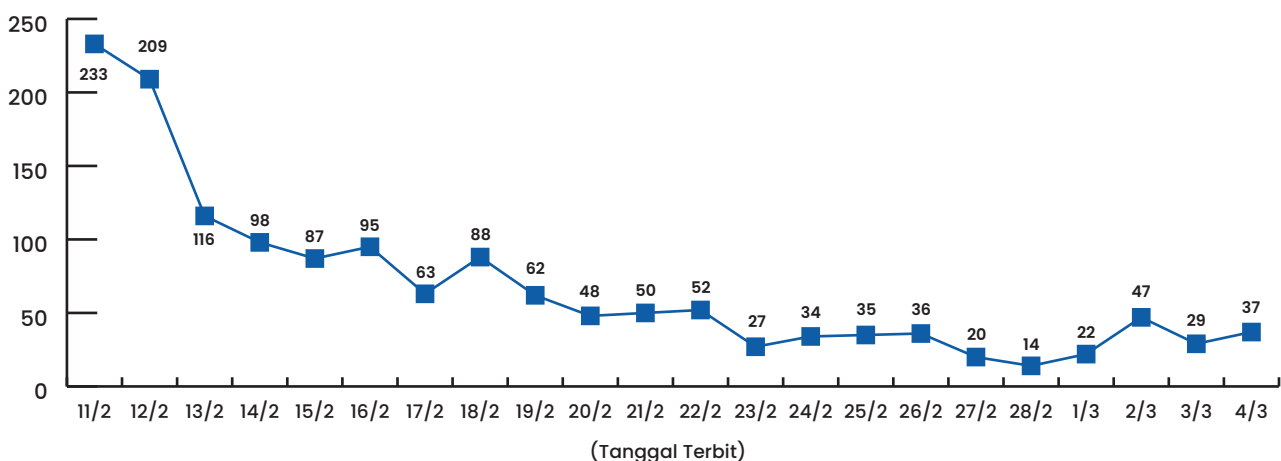
Bahasan mengenai kebingungan guru dan siswa, tantangan kolaborasi antar pihak, rendahnya kompetensi guru, dan sinkronisasi dengan perguruan tinggi merupakan beberapa ulasan bernada kritik yang perlu mendapat perhatian.

Selain topik perihal keunggulan karakteristik Kurikulum Merdeka, ada pula topik mengenai saran dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan kritik terhadap Kurikulum Merdeka. Topik artikel yang berisi saran sebagian besar berkaitan dengan perlunya penguatan kapasitas guru (60%), serta penguatan kapasitas orang tua dan penyediaan pedoman dan pendampingan dalam penerapan Kurikulum Merdeka (masing-masing 20%).

Berbeda halnya dengan topik mengenai saran implementasi Kurikulum Merdeka, bahasan artikel bernada kritik terhadap Kurikulum Merdeka memiliki derivasi topik yang lebih beragam. Kebingungan di kalangan guru dan siswa dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, menjadi topik yang paling banyak dibahas (18,75%), selain tantangan kolaborasi antar pihak dalam implementasi Kurikulum Merdeka (15,63%), rendahnya kompetensi guru, serta sinkronisasi dengan ketentuan seleksi masuk perguruan tinggi (masing-masing sebesar 12,5%). Bahasan mengenai saran dan kritik Kurikulum Merdeka ini perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya mengoptimalkan penerapan Kurikulum Merdeka.

Terdapat sekitar 1.502 unggahan mengenai Kurikulum Merdeka di Twitter pada periode 11 Februari - 4 Maret 2022. Sejumlah 44% bernada positif, 41% netral, dan 14,6% lainnya bernada negatif.

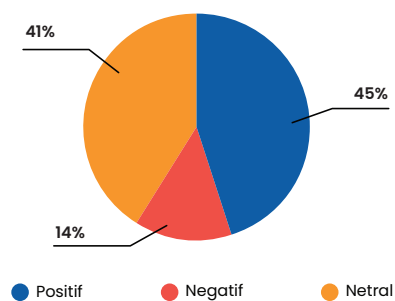
Analisis terhadap media sosial menemukan unggahan tertinggi terjadi pada hari peluncuran Kurikulum Merdeka, yaitu pada 11 Februari 2022. Selepas itu, sama halnya dengan media *online*, perbincangan mengenai topik Kurikulum Merdeka mengalami tren penurunan (Grafik 4). Tren unggahan mengenai Kurikulum Merdeka di media sosial juga sedikit banyak dipengaruhi oleh momen peluncuran kebijakan lain yang dianggap mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Salah satunya ketika peluncuran Merdeka Belajar episode ke-16 mengenai “Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan” pada 15 Februari 2022 turut meningkatkan unggahan mengenai Kurikulum Merdeka di tanggal yang sama, yaitu sebanyak 98 unggahan.



Grafik 4 Tren Unggahan di Twitter (Periode 11 Februari - 4 Maret 2022) (n=1.502)

Dilihat lebih jauh, respons dan sentimen publik mengenai topik Kurikulum Merdeka dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bernada positif, netral, ataupun negatif, di mana masing-masing sebesar 45%, 41%, dan 14% (Grafik 5). Sentimen bernada netral ditunjukkan pada unggahan yang sekadar menginformasikan kembali/membagikan ulang (*retweet*) mengenai informasi atau pemberitaan Kurikulum Merdeka. Respons bernada netral tersebut umumnya dilakukan oleh akun media sosial milik laman berita.

Sentimen bernada positif misalnya berkaitan dengan respons publik mengenai keunggulan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka dalam praktik pembelajaran. Sedangkan pada sentimen bernada negatif umumnya berkaitan dengan pandangan bahwa perubahan kurikulum cenderung menyulitkan dan membingungkan guru atau siswa, serta anggapan bahwa perubahan kurikulum terkait dengan kepentingan politik semata. Berbagai respons yang ditunjukkan di media sosial dipengaruhi oleh beragam faktor. Analisis mengenai opini publik terkait COVID-19 melalui media sosial *Sina-Weibo* di China menunjukkan bahwa respons seseorang di media sosial dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti paparan informasi yang didapatkan, khususnya yang berasal dari rilis resmi lembaga yang kredibel, dan pengalaman seseorang pada isu terkait (Han et al., 2020). Pada konteks Kurikulum Merdeka, respons yang menggambarkan sentimen publik melalui unggahan di *Twitter* sedikit banyak dipengaruhi oleh paparan informasi yang didapatkan, baik ketika Kurikulum Merdeka diluncurkan pada 11 Februari 2022 atau sebelumnya melalui informasi mengenai Kurikulum Prototipe yang telah diimplementasikan di satuan pendidikan pelaksana Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.



Grafik 5 Respons dan Sentimen Publik di Twitter mengenai Topik Kurikulum Merdeka (n=1.502)

Berdasarkan pembahasan di atas, secara garis besar terdapat dua gejala permasalahan. Pertama, kurangnya jumlah pemberitaan di media massa. Kedua, adanya sentimen negatif di media sosial terhadap kebijakan kurikulum merdeka. Dari dua gejala permasalahan di atas, dilakukan identifikasi permasalahan dengan menggunakan *logic tree*. Identifikasi permasalahan menunjukkan dua faktor penyebab, yaitu kurangnya sosialisasi kebijakan dan komunikasi kebijakan yang tidak efektif.

Setelah melakukan identifikasi permasalahan, dilakukan *root cause analysis* untuk melihat akar permasalahan yang ada. Hasil analisisnya menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya penggunaan platform media sosial. Dari data yang dikumpulkan, belum semua platform media sosial digunakan secara maksimal. Di media sosial Tiktok misalnya, hanya ditemukan satu postingan terkait Kurikulum Merdeka, padahal pengguna Tiktok per Juli 2021 mencapai 92,2 juta pengguna, dengan 13% pengguna berusia 13-17 tahun. Usia ini merupakan usia peserta didik yang terkait langsung dengan penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka
2. Kurangnya *influencer* yang terlibat. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sejumlah postingan pada Instagram, Twitter, dan Tiktok, belum terlihat ada keterlibatan *influencer* pada postingan mengenai Kurikulum Merdeka
3. Belum maksimalnya peran kehumasan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah unggahan mengenai Kurikulum Merdeka dari peran humas Kemendikbudristek masih minim. Di kanal Youtube Kemendikbudristek tercatat hanya ada dua video terkait Kurikulum Merdeka. Di Instagram Kemendikbudristek, jumlah postingan terkait Kurikulum Merdeka kurang dari lima postingan. Di Instagram BSKAP, jumlah postingan lebih banyak, tercatat setidaknya terdapat enam postingan terkait Kurikulum Merdeka. Begitu pula pada Twitter, jumlah *tweet* pada Twitter Kemendikbudristek maupun BSKAP jumlahnya masing-masing tidak lebih dari sepuluh.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, studi ini merekomendasikan beberapa hal.

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan strategi kehumasan

Strategi kehumasan yang baik, yaitu dengan 1) menempatkan kehumasan pada posisi yang strategis, 2) memiliki rencana komunikasi, sehingga tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, 3) memiliki fungsi dan peran juru bicara; 4) memahami *stakeholder* dan *audience*-nya dengan baik, 5) mengolah pesan secara kreatif sesuai target sasarannya, dan 6) selalu melakukan proses evaluasi dari komunikasi sebelumnya (Paparan Strategi Komunikasi Publik Jelas, Akurat dan Terpercaya). Salah satu poin penting dalam memperbaiki strategi kehumasan adalah perlunya secara berkala melakukan rilis media maupun membuat unggahan terkait topik Kurikulum Merdeka pada media sosial kementerian maupun unit kerja di bawahnya.

2. Peningkatan SDM bidang kehumasan

Peningkatan kapasitas SDM bidang kehumasan perlu dilakukan secara berkala. Hal ini agar bidang kehumasan dapat menyusun strategi kehumasan yang efektif dan dapat meningkatkan kreativitas dalam menjalankan peran kehumasan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden tentang komunikasi pemerintah, "Perubahan itu mutlak. Kehumasan Pemerintah harus selalu berubah dan beradaptasi secara kreatif mengikuti perkembangan teknologi. Isi dengan pembicaraan baik dan optimisme di media sosial dan *mainstream*." (dalam Paparan Strategi Komunikasi Publik Jelas, Akurat dan Terpercaya).

3. Memaksimalkan penggunaan platform media sosial

Platform media sosial yang banyak digunakan perlu dimaksimalkan penggunaannya. Twitter dan Tiktok dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan. Hal ini mengingat Twitter merupakan platform media sosial yang selama ini banyak memuat diskursus isu-isu nasional. Sedangkan Tiktok, 13% penggunaannya merupakan peserta didik berusia 13-17 tahun yang merupakan sasaran dari kebijakan Kurikulum Merdeka.

4. Menggunakan influencer dalam komunikasi kebijakan Kurikulum Merdeka

Peran *influencer* sangat penting dalam komunikasi kebijakan karena lebih mudah mempengaruhi *audience* atau penggemar dari *influencer* tersebut. Hal ini yang menjadikan *influencer* dapat berperan pada komunikasi pemberitaan negatif, yaitu untuk meminimalisasi sentimen negatif terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka.

Daftar Pustaka

- Afif, Ahmad Shofwan, Pratama, Ahmad. (2021). Analisis Sentimen Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 dengan CrowdTangle di Instagram. *Jurnal Automata, Universitas Islam Indonesia*. Vol. 2, No. 2
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (1993). *Agendas and instability in American politics*. Chicago, IL: University of Chicago Press
- Budi, Johan. (tanpa tahun). Strategi Komunikasi Publik Jelas, Akurat dan Terpercaya [Presentasi PowerPoint]. Diakses dari https://www.bsn.go.id/uploads/download/Strategi_Komunikasi_BSN1.pdf
- Daddow, Oliver. (2019). *Policy Success and Failure: Embedding Effective Learning in Government*. The Bennett Institute for Public Policy, University of Cambridge.
- Detik.com. (11 Februari – 4 Maret 2022). *Pembelajaran Tatap Muka*
- Engzel, Per, Frey, Arun, Verhagen, Mark. (2021). Learning loss due to school closures during the Covid-19 pandemic. *PNAS*. Vol. 118 No.17 DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2022376118>
- Han, Xuehua, Wang, Juanle, Zang, Min, Wang, Xiaojie. (2020). Using Social Media to Mine and Analyze Public Opinion Related to COVID-19 in China. *International Journal Environment Research Public Health*. Published online 2020 April 17. DOI: 10.3390/ijerph17082788
- INOVASI dan Puslitjak. (2021). *Pemulihan Pembelajaran: Waktunya untuk Bertindak*. Risalah Kebijakan edisi Agustus 2021.
- Jones, B. D., & Wolfe, M. (2010). *Public Policy and The Mass Media: An Information Processing Approach*. New York, NY: Routledge.
- Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. (11 Februari 2022). *Paparan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP). (2022). *Survei Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka & Analisis Media Online dan Media Sosial*.

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh **Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

**Diyan Nur Rakhmah
Lukman Solihin
Imelda Widjaja
Yunita Murdyaningrum
Asma Aisha**